

Publikasi #2019
Ikatan Sosiologi Indonesia



Memahami Kembali Indonesia

Penyunting: Akhmad Ramdhan

Pengantar

Memahami Kembali Indonesia

© Penulis

Penyunting: Akhmad Ramdhon

Reviewer:

Akhmad Ramdhon,

Argo Demartoto,

Siti Zannaryah,

Yulius Slamet

Foto Sampul: Edi Wibowo

Perancang Sampul: Ayo Prakosa

Penata Letak: Mapa

Diterbitkan atas kerjasama:

Ikatan Sosiologi Indonesia,

Lab. Sosio Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

dengan:

Buku Litera Yogyakarta

Minggiran Mj W13378, RT 63/17

Suryodiningrat, Manirjeron, Yogyakarta

Telp. 0274-385895, 08179407446

booklitera@gmail.com, nutapadi_media@yahoo.com

Tek cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Oktober 2013

XVI + 952 hlm., 15,5 x 23,5 cm

ISBN: 978-602-7636-46-0

Dicetak oleh:

Mara Puri Pressindo

Telp. 0274-380093

08179407446, 081227837906

booklitera@gmail.com

Ide-ide Reformasi tak terasa telah berjalan satu dekade lebih. Banyak perubahan yang terjadi, desentralisasi, pemilihan umum yang terbuka, pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah, reformulasi regulasi, penataan kembali kelembagaan dalam skala nasional hingga regional. Transisi tersebut juga beriringan dengan kekecewaan, konflik, dan kekerasan yang melanda nusantara. Indikator-indikator kemiskinan, kriminalitas, dan korupsi tiba-tiba menyeruak bersamaan dengan tumbuhnya indikator pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam skala yang lebih luas. Beragam tantangan hadir bersamaan dengan momentum global untuk segera mungkin diadaptasi.

Melihat kembali semua gejala dan jejak perubahan yang ada dan telah terjadi dalam era Reformasi menjadi penting untuk memberi bekal pengetahuan sekaligus menjelaskan posisi strategis kita dalam bangsa dan bernegara. Upaya mengupdate semua bentuk-bentuk pengetahuan terbaru akan menjadi modal bagi semua pihak untuk mengambil langkah-langkah terbaik bagi proses dan upaya untuk berkontribusi bagi pengelawantahan Reformasi. Perubahan yang telah berjalan mesti dilihat kembali dalam sudut pandang yang kritis agar kita punya kesempatan memperbaiki dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Untuk itu, beragam kontribusi dalam bentuk temuan ide, riset, dokumentasi maupun publikasi tentang beragam perubahan yang telah terjadi satu dekade terakhir menjadi urgent untuk mengkajinya bersama-sama.

Materi dalam buku ini adalah rangkaian dari Seminar Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia #2013, yang bertujuan untuk mempertemukan para peneliti, pengajar, pembelajar, dan peminat Sosiologi seIndonesia lewat forum ilmiah yang berkala. Kesempatan untuk bersama dalam forum akan memberi kesempatan untuk

Yulius Slamet yang telah menyiapkan semua materi menjadi bahan yang siap dipublikasikan. Terima kasih juga, teruntuk Buku Litera yang telah memfasilitasi dan memungkinkan semua materi menjadi bahan bacaan yang bisa diakses lebih luas, sekalipun dengan waktu yang teramat pendek. Tentu masih ada banyak kekurangan namun kerennan untuk mengawali publikasi menjadi motivasi yang utama, untuk itu masukan dan saran menjadi penting bagi kita semua.

Surakarta, Oktober 2013
Harian Sosiologi Indonesia &
Lab/Posko Sosiologi FISIP UNS

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Bagian Satu Tradisi dan Perubahan Sosial	
Ahmad Zuber Konflik Agraria Di Masyarakat Pedesaan: Kasus Di Desa Sanggang	3
Akhmad Ramdhan Para <i>Penghulu</i> Kauman: Transformasi Dan Formalisasi Tradisi Kampung Kauman Surakarta	15
Andi Burhanudin, Rasyidah Zainuddin Institusionalisasi Modal Sosial Di Era Modern Menyertakan Eksistensi Komunitas Khusus	36
Djaja Hendra "Jebakan" Keistimewaan DIY: Perspektif Sosiologi Agraria	47
Eymal B. Demmallino, M. Saleh S. Ali, Abd. Qadir Gassing & Munsi Lampe Kapitalisme dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Maritim: Studi Kasus pada Komunitas Pasompe' Di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan	66
Ikma Citra Ranteallo, Nazrina Zuryani & Denny Jusuf Teman Toraja: Karya Tangan Berbasis Tradisi Menuju Pasar Global	87

M. Nurun Najib	
Konstruksi Identitas Keagamaan: Studi Tentang Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Dengan Masyarakat Lokal	102
Muhammad Masdar	
Urgensi "Trust" Dalam Masyarakat Multietnik: Studi Interaksi Antar Etnik di Wonomulyo Kabupaten Polman Sulawesi Selatan	132
Rigit Pranawa	
Rasionalitas Perajin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Usaha: Studi Di Sentra Kerajinan Perak Kotagede	151
Triani Utami	
Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional Melalui Inovasi Kelembagaan	169
Bagian Dua	
Lingkungan dan Pemberdayaan	
Anni Tenti	
Ranomel Melawan Negara: Dramaturgi Sehari-hari Untuk Interaksi Pengelolaan Hutan	187
Ary Wahyono	
Community Based Co-Management: Perspektif Sebagai Model Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	205
Eli Gusli	
Adaptor Sosial: Dari Konsep Ke Beberapa Pengalaman Apikasi	218
Jeffa Febro, Sri Yuliani & Rahesti Humsona	
Ceriter Dalam Mitigasi Bencana: Studi Di Kabupaten Karanganyar	234
Nana Haryanti	
Reformasi Sektor Keluhan: Tantangan Pada Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	254

Rachmad K Dwi Susilo	
Pengembangan Model Co-Management Berbasis Pembelajaran Sosial Untuk Pencegahan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air Minum Bagi Masyarakat Sekitar Sumber Air Di Kota Batu	271
Siti Zunariyah	
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial Di Yogyakarta	300
Sulistyaningsih	
Dinamika Sosial Politik Sertifikasi Hutan Rakyat Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta	321
Bagian Tiga	
Perempuan, Anak dan Perlindungan	
Ambar Sari Dewi	
Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh Perempuan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah di Jawa Tengah dan Yogyakarta	341
Aniek Rahmadiyah	
Perempuan Dan Politik Pada Era Otonomi Daerah	361
Dadang Hikmah Purnama	
Kekerasan Terhadap Anak Perempuan Di Palembang	381
Diana T Cahyaningsih, Eva Agustianawati & Sumardiyo	
Strategi Perlindungan Bagi Pekerja Terburuk Anak Menuju Kota Layak Anak Di Surakarta	398
Keppi Sukesi, Yeni Puspita Sari	
Migrasi Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Kebahagiaan Perempuan Buruh Migran dan Rumah Tangganya	412
Kuslmi	
Perkawinan Dibawah Umur: Puposnya Masa Depan Perempuan Di Cianjur	419

Marlina Zuryani, Ni Luh Nyoman Kebayantini Cahaya Sosial KPU dan Wareg: Remungan Keterwakilan Perempuan di Bali	444
Rahaeli Humsona Mengembangkan Relasi Seksual Yang Sehat Melalui Pemberdayaan Anak Yang Dilacurkan (Ayla) Di Kota Surakarta	460
Siti Hukla, Nursini, A. Nixia Tenriawaru & Rahmadanah Model Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Miskin Berpekerja Gender Dalam Upaya Penguatan Kemiskinan di Kabupaten Soppeng dan Bone	479
Vivita Susanti Kajian Sosiologis Terhadap Perempuan Pembunuh	493
Widjajanti M Santoso Revolusi PKK: Memikirkan Kontribusi Sosiologis Dalam Konteks Ketahanan Keluarga	518
Bagian Empat Pendidikan dan Karakter Moral	
Atik Catur Budiati, Siany Indria Liestyasari Reproduksi Kekerasan di Kalangan Siswa SD dan Implikasinya Bagi Pendidikan Berkarakter Di Kota Surakarta	543
Bagus Haryono, Edy Tri Sulistyono & Ahmad Zuber Pengembangan Model Pendidikan Empat Pilar Bangsa Pada Masyarakat Akar Rumput Menuju Terwujudnya Integrasi Nasional di Kota Surakarta	562
Basitama Interaksi Sosial Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif	596

Hartati Sulistyono Rini Implementasi Pendidikan Multikultural Sebagai Modal Sosial Dalam Kehidupan Berbangsa	602
Sri Hilmi Pujihartati, Bambang Wiratsasonoko & Argyo Demartoto Standar Pendidik Sebagai Salah Satu Syarat Keberhasilan Pelaksanaan Program PAUD Dalam Membentuk Karakter Anak	620

Bagian Lima
Modal Sosial

Arianti Ina Restiani Hunga Modal Sosial Dalam Industri Berbasis "Putting-Out" System: Studi Kasus Cluster Batik di Sragen & Surakarta	639
Arie Wahyu Prananta, Sabarudin Ahmad, Muallim & Zainal Abidin Industrial Impact Analysis In The Industry Cresik, East Kalimantan and Bali, Using Structural Equation Modeling, Social And Mapping "Post Industrial Society To Economy Consumptive"	679
Erik Aditia Ismaya Falsafah Gusjilang Sebagai Modal Sosial Membangun Masyarakat Kudus yang Sejahtera	704
Ferdinand Kerebungu Pemberdayaan Masyarakat Di Obyek Wisata Pantai Malalayang Dua Manado	720
Indah Meliasari Dukungan Modal Sosial Dalam Implementasi Program Jaminan Persalinan Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat	739
Rosmawaty Jaringan Sosial Sebagai Strategi Adaptasi Pada Janda Korban Konflik Di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah	762

Syamsu A. Kamaruddin
Revitalisasi Modal Sosial Pada Masyarakat Transisi 772

Bagian Enam

Teori dan Kompleksitas Modernitas

T. R. Andi Lolo, Bastiana

Restrukturisasi Dan Reorientasi Pendidikan Sosiologi
Di Indonesia 785

Argyo Demartoto, Endang Gerilyawati IES

& D Priyo Sudibyo

Kekeualitas Masyarakat Bertisiko: Studi Kasus
Pada Laki-Laki Yang Berhubungan Seks Dengan Laki-Laki
Di Surakarta 802

Bambang K. Prihandono

Neuro-Sosiologi: Memahami Nalar Modal Sosial
Dan Inovasi/penelitian Awal Tentang Konsep
Neuro-Sosiologi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan
Modal Sosial di Indonesia 822

Craig Cook

The Social Construction Of Bodies Through Basketball
During The American Occupation Of The Philippines
1906-1922 838

Tajal Junardi, Akhmad Ramdhan

Paradigma Berujung Konflik: Potret Identitas Anak Muda
Urban Penggemar Bola 865

Hanzah Fansuri

Kontribusi Kelimuan Sosiologi di Era Pasca-Ruang 883

Siti Amanah, Dien Vidia Rosa & Hey Prasetyo

Pasca Bencana Dan Ketakterhentiannya: Studi Tentang
Kultur Resiko Dalam Kesehatan Yang Traumatik 899

M. Ridhah Taqwa

Politik Cita Dan Implikasinya Pada Pemilihan Umum Era
Reformasi: Perspektif Sosiologi Kekuasaan 919

Sri Murianti

Transformasi Kultural Elemen-Elemen Budaya Disiplin Klinis
Ke Dalam Praktik Jasa Perawatan Kecantikan 932

Gender Dalam Mitigasi Bencana: Studi di Kabupaten Karanganyar

Jetfa Leibbo, Sri Yuliani & Rahesli Humsona

jetfa.leibbo@gmail.com

Universitas Sebelas Maret

Pendahuluan

Di antara berbagai macam jenis bencana, bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, gempa dan tanah longsor merupakan jenis bencana yang tidak mendiskriminasi korbananya. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan terhadap korban justru terjadi pasca bencana. Pihak yang sering terabaikan kebutuhannya adalah perempuan dan anak. Riset yang dilakukan Organisasi Internasional (ILO) pada tahun 2000 menunjukkan masalah gender memiliki dimensi sangat penting di dalam bencana yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara (Rochelle Jones seperti dikutip Savitri, 2005). Kondisi rentar pascabencana alam dan akibatnya dapat dikonstruksi secara sosial dan memiliki dimensi gender (Savitri, 2005). Artinya, perempuan dan laki-laki mempunyai bencana alam dan akibatnya secara berbeda, sesuai peran mereka dalam masyarakat yang memang dikonstruksikan secara berbeda. Bencana yang secara fisik terlihat sama, akan menimbulkan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, sesuai peran yang dilekatkan masyarakat kepada mereka.

Savitri memcontohkan, di Indonesia perempuan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan keluarga. Tanggung jawab itu memberi beban yang lebih berat kepada perempuan di dalam situasi pascabencana karena kewajiban merawat dan memelihara terbentuk pada dirinya sebagai sumber sumber yang tersedia. Oleh karena itu

dan kebijakan antisipatif dan pemulihan dampak bencana seperti membangun secara khusus aspek kebutuhan gender program dan tindakan yang dilakukan.

Penanggulangan bencana di Indonesia tidak lagi dipandang tindakan tanggap darurat atau sebagai bentuk respon yang setelah terjadi bencana. Adanya payung hukum Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah meningkatkan bencana sebagai kegiatan yang integrative dari pencegahan atau mitigasi sampai pasca bencana atau insasi dan rekonstruksi. Sebagai wujud komitmen dalam penanggulangan bencana, pemerintah telah menyusun Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana 2010-2014. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah untuk menyusun rencana strategis yang efektif pengurangan risiko bencana dan di tingkat daerah, pemerintah wajib menyusun Rencana Penanggulangan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014.

Insasi wilayah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang dan sekitarnya, adanya kebijakan, rencana nasional dan badan penanggulangan bencana merupakan kebutuhan yang karena menurut Nurrochman, Direktur Departemen Aksi Cepat Tanggap, secara geografis Surakarta adalah kawasan bencana karena berdekatan dengan Gunung Merapi yang sangat Bengawan Solo. Semua daerah aliran sungai yang di belu juga rawan bencana banjir. Lebih luas, Jawa Tengah dan ditetapkan menjadi provinsi paling rawan bencana di Indonesia. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang tidak hanya perbaikan. Perlu aksi tanggap darurat yang terencana dan akurat. Langkah ini Nurrochman menilai upaya mengurangi risiko bencana seperti gempa di Jawa Tengah masih sangat kurang karena akses perlu adanya dokumen perencanaan tanggap bencana di tiap daerah. Menurut Nurrochman, dokumen tersebut penting untuk mengurangi risiko bencana berikut penanggulangannya (Jepang, 15/11/2012).

Dari beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah seperti gempa, letusan gunung berapi, dan banjir, penanganan terhadap korban bencana tampaknya juga belum mempertimbangkan aspek kebutuhan gender. Hasil penelitian Neumayer dan Pratiwi (2007) menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap bencana. Di 141 negara yang diteliti selama periode 1981-2002 ditemukan bahwa lebih banyak perempuan yang meninggal karena bencana alam ketimbang laki-laki dan ini terjadi karena status sosial ekonomi perempuan yang tidak sebaik laki-laki. Apabila status sosial ekonomi antara perempuan dan laki-laki seimbang, maka korban meninggal akibat bencana alam akan seimbang di kedua jenis kelamin. Sebaliknya apabila status sosial ekonomi perempuan rendah maka korban meninggal perempuan menjadi lebih banyak.

Penelitian Prihastuti (dalam Lisna, 2011) terhadap gempa di Yogyakarta tahun 2007 menemukan hasil yang serupa yaitu korban perempuan menempati persentase yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Prihastuti menyebutkan setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi yaitu faktor halangan fisik, sosial budaya, dan faktor kendala dalam mengakses pelayanan dan bantuan yang seharusnya menjadi hak perempuan.

Enarson (2009) menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun oleh masyarakat. Perempuan memiliki akses sedikit akses ke sumberdaya, seperti: jaringan sosial, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melekat pada kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Hasil seminar Komnas Perempuan untuk Aceh (2006) menunjukkan bahwa kaum perempuan (terutama janda) mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan. Partisipasi perempuan Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga belum maksimal (Prayono, 2007; Lisna, 2011).

Ridho (2011), manajemen bencana yang tidak sensitif gender lebih disebabkan oleh minimnya data pilah tentang warga yang memiliki pemerintah. Data pilah dimaksud adalah tentang jumlah perempuan dan laki-laki dewasa, jumlah anak perempuan dan laki-laki, jumlah difabel perempuan dan laki-laki, jumlah perempuan dan laki-laki, jumlah ibu hamil, serta jumlah dan bayi perempuan dan laki-laki yang tersusun rapi di tingkat desa dan daerah yang terdampak bencana.

Salah satu kasus penanganan erupsi Merapi, menurut Ridho (2011), menunjukkan data pilah sehingga ketika terjadi bencana, tidak terdapat bagaimana kelompok-kelompok rentan: lansia, ibu hamil, perempuan dan anak, seharusnya diprioritaskan. Kelompok-kelompok rentan ini harus dibedakan penanganannya dengan kelompok lainnya, karena mereka berada dalam kondisi yang kritis dan harus dipahami dan ditangani dengan tepat, berikut ini bantuan yang mesti disiapkan. Baik bantuan berupa barang maupun pangan, kesehatan maupun bantuan lainnya. Untuk hal ini menyatakan perlunya data terpilah berdasar gender yang dimiliki oleh semua jajaran pemerintah mulai tingkat RT hingga pemerintah Pusat. Identitas gender jika diketahui dengan baik para pengambil kebijakan dapat meringankan tugasnya dalam menangani setiap kali terjadi bencana. Adanya perspektif gender dalam manajemen bencana dapat mencegah terjadinya bencana dikomunitas yang seringkali dialami perempuan dan keluarga korban peristiwa bencana.

Perlu diperhatikan fakta bahwa kelompok perempuan perlu mendapat perhatian lebih untuk penanggulangan bencana di masa depan datang, maka diperlukan analisis kebutuhan gender yang sebenarnya agar pemerintah dan lembaga terkait memiliki kebijakan yang lebih ramah gender dalam penanggulangan bencana di masa yang akan datang.

Metode

Penelitian dilakukan di Kabupaten Karanganyar yang memiliki posisi daerah rawan ke 13 di Indonesia. Penelitian dilaksanakan 2 tahun. Pada tahun pertama ini lebih banyak

Atakutkan riset lapangan dengan jenis penelitian kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang isu, peran kebutuhan gender yang ada dalam peristiwa bencana alam. Riset kedua dilakukan riset aksi untuk menguji coba prototipe yang telah dikembangkan guna mendapatkan model kebijakan mitigasi bencana yang berbasis pada kebutuhan gender.

Sampel penelitian ini diambil dari warga masyarakat pemukiman formal dan informal yang terlibat dalam aksi mitigasi bencana. Sampling menggunakan teknik *purposive* pada data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya yakni dari staf di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar, kelompok relawan, organisasi masyarakat yang bergerak dalam penanggulangan bencana, dan masyarakat, pemimpin formal dan informal.

Pengambilan data primer diperoleh melalui teknik observasi wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) (Kreber 1994; Irwanto, 2006). Data sekunder dengan menggunakan teknik dokumen. Untuk menjamin validitas data dalam penelitian digunakan triangulasi sumber dan metode (Moleong, 2009). Teknik analisis Moser digunakan untuk mengkaji kebutuhan gender dalam mitigasi bencana.

Sebelum mengidentifikasi kebutuhan gender berkaitan dengan bencana alam, terlebih dahulu peneliti mengkaji peran dan kebutuhan gender, bentuk kegiatan mitigasi bencana, kemudian melakukan penilaian terhadap kebijakan mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dengan langkah tersebut, pengidentifikasiian kebutuhan gender dalam kebijakan mitigasi bencana menjadi lebih mudah.

Gender dan Mitigasi Bencana

Bencana alam tidak mendiskriminasi korbannya. Meskipun begitu, bencana alam menimbulkan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa perempuan merupakan pihak yang paling menderita dalam setiap bencana alam maupun bencana sosial. Perempuan

diakibatkan oleh manusia yang melakukan tindakan perlakuan pada korban, baik secara sengaja atau karena kelaparan.

Kejadian dari *Centers for Disease Control and Prevention*, menunjukkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, pertumbuhan yang cepat, dan degradasi lingkungan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap tingkat keparahan bencana. Frederick dan *Harvard Humanitarian Initiative-Harvard School of Public Health* menyatakan tanggapan bencana yang efektif tergantung pada kemampuan memobilisasi Sistem Informasi Kesehatan, menyediakan informasi dasar dan penargetan pada kelompok berisiko, pengetahuan bahwa anak-anak, orang tua, dan perempuan adalah berisiko tinggi menjadi korban bencana. Lynn Lawry, Direktur Penelitian dan Pendidikan di *Uniforunes Services Center of the Health Sciences* Departemen Pertahanan Amerika menambahkan bahwa kerentanan ini terus berlanjut lama karena bencana terjadi. Lawry mencatat bahwa setelah terjadi gempa di New Orleans- perkosaan dan kekerasan terhadap perempuan meningkat (<http://www.wilsoncenter.org/event/health-management-after-natural-disasters>).

Gender atau konstruksi sosial tentang perbedaan peran laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama yang menyebabkan perempuan terdiskriminasi dalam bencana. Secara mendasar, gender berbeda dengan jenis kelamin biologis. Gender merupakan peran yang menyampaikan pada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Kalau jenis kelamin berkaitan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki seorang perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan maskulin feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar yang diakui biologis oleh kultur kita. Gender, dengan demikian merupakan *social construct* yang menentukan dan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sifat gender adalah *specific* dan dinamis, artinya dapat bervariasi dari satu lingkungan socio-kultural ke lingkungan yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain (Dekrowinoto, 1996; Mosse, 1996).

Analisis Gender, seperti dikutip dari Pusat Penelitian Pengembangan Gender UN5 (2003: 52-53), merupakan *tools* yang menjadi dasar dari setiap proses pengamalan gender baik dari aspek kebijakan, program maupun kegiatan akan dikembangkan/dilaksanakan. Analisis gender diibaratkan sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan dan kegiatan yang responsif gender. Analisis gender dimulainya data dan fakta serta informasi tentang gender, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Dengan analisis gender diharapkan keunggulannya gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya secara sistematis. Analisis gender sangat penting, khususnya bagi para perencana dan perencana di setiap sektor karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipecahkan sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan.

Ada beberapa teknik analisis gender yang dapat dipergunakan yaitu analisis gender Moser, Harvard, Longwe, Munro, *Capra and Vulnerabilities Analysis (CVA)*, *Gender Analysis Matrix (GAM)*, *The Logical Framework Matrics Longrame* (Matrik Kerangka Kerja Logik) dan teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)* berdimensi Gender (Handayani dan Sugiharti, 2002) serta *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Analisis gender yang sering digunakan dalam perencanaan pembangunan responsif gender yaitu *Moser, Harvard dan GAP*. Sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan praktik-praktik strategis gender dalam kebijakan mitigasi bencana, maka analisis gender yang digunakan adalah analisis Moser.

Teknik analisis Moser adalah suatu teknik analisis yang membantu perencanaan atau peneliti dalam menilai, mengorganisir, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender, dengan menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kesetaraan, keadilan, kemandirian, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan), identifikasi terhadap peranan informal perempuan (*reproduktif, produktif, sosial-kemasyarakatan*), serta mengidentifikasi kebutuhan gender peka

Handayani dan Sugiharti, 2002: 176). Kebutuhan praktis adalah kebutuhan jangka pendek yang berhubungan untuk pemenuhan praktis supaya seseorang bisa menjalankan tugas dengan tugas dan peran gender masing-masing. Kebutuhan praktis juga merupakan respons untuk lebih spesifik pada kebutuhan yang lebih spesifik. Kebutuhan praktis ini biasanya diformulasikan dari kondisi nyata masyarakat dan untuk kelangsungan hidup manusia. Pemenuhan strategis adalah kebutuhan yang muncul dari pemenuhan perempuan yang tidak menguntungkan dalam pemenuhan strategis ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan yang memerlukan waktu lama untuk pemenuhan sehingga dengan analisis Moser diharapkan pemenuhan informasi mengenai kebutuhan gender praktis berkaitan dengan bencana alam serta upaya untuk pemenuhan kebijakan mitigasi bencana dalam rangka untuk pemenuhan jumlah korban.

Analisis tersebut dapat membantu perencanaan program bencana dalam menentukan kebijakan, khususnya dalam pemenuhan antisipatif berupa mitigasi yang lebih peka gender tersebut mengingat begitu besarnya kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Karanganyar oleh *Badan Topografis*, serta dari hasil riset yang dilakukan *Handayani (2000)* yang menunjukkan bahwa, masalah gender yang dinilai sangat penting di dalam bencana seperti yang di beberapa negara di Asia Tenggara.

Handayani (2007) mengemukakan upaya mitigasi bencana alam dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni: *pra-bencana* dan *mitigasi risiko* dalam tahap pra-bencana, bantuan *segera* setelah kejadian, dan *rekonstruksi* pasca-bencana *jangka panjang*. Penelitian ini hanya mengkaji *mitigasi bencana* tahap pra-bencana dan penanganan saat *terjadi* adalah penjelasan *Dimitrovićs* mengenai gender *mitigasi risiko* (*pra-bencana*) dan gender dalam penanganan *pasca-bencana* (*Handayani relief*).

a. Mengumpulkan data sensitif gender : Mengumpulkan tentang mortalitas dan morbiditas yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dapat berkontribusi untuk sistem manajemen bencana yang adil dan efisien. Hal ini memungkinkan identifikasi pra- dan tren pasca bencana, dan memungkinkan untuk merencanakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan aktual

b. Legal infrastruktur : lingkungan hukum dapat mempengaruhi ketahanan perempuan dan laki-laki terhadap bencana. Pendataan rumah dan kepemilikan lahan diperlukan dalam rekonstruksi pasca-bencana, terlebih jika perlu dilakukan relokasi dimana akan dialokasikan kembali dan aset baru. Dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana, kepemilikan rumah dan tanah karenanya harus secara legal bagi perempuan maupun untuk setiap keluarga lain dalam masyarakat. Diartikan kepemilikan aset atas suami isteri, karena di kebanyakan Negara sedang berkembang kepemilikan asset atas nama laki-laki (suami). Dicantumkan nama isteri sebagai pemilik asset membantu perempuan mengakses kredit atau memulai usaha baru. Perempuan perlu juga dicantumkan dalam hak atas warisan. Hal ini akan membantu hidup anak perempuan serta janda dan penulihan dari kerugian yang terjadi dalam bencana, dan memperkuat otonomi dan kekuasaan mereka dalam rumah tangga.

c. Asuransi risiko bencana harus dipastikan bisa diakses semua segmen masyarakat, termasuk perempuan.

d. Rekrutmen perempuan sebagai aparat atau satuan pengamanan atau melibatkan perempuan dalam penanganan bencana, tidak hanya sebagai pelaksana fungsi domestik, membantu perempuan terhindar dari tindak kekerasan yang bisa terjadi saat pasca bencana.

e. Infrastruktur fisik : Karena laki-laki banyak beraktivitas di rumah, sedangkan perempuan waktunya banyak menghabiskan tempat tinggal, oleh karena itu, penguatan infrastruktur fisik memberi manfaat sangat besar bagi ketahanan perempuan.

2. Desain penampungan atau shelter yang ramah, dan aman bagi perempuan

3. Peran manusia : Kekuatan fisik dan kebugaran juga dipengaruhi ketahanan individu terhadap bencana. Ketahanan tidak hanya tergantung pada faktor biologis dan kelainan, tetapi juga pada kondisi fisik secara umum, kesehatan gizi dan kesehatan. Perempuan di Asia, terutama yang miskin, terbiasa mendapat jatah makanan paling sedikit dibanding anggota keluarga laki-laki. Makanan lebih sedikit untuk suami atau anak, mereka terkandang hanya sebagai sisa-sisa makanan. Karena itu, perempuan miskin cenderung terdampak bencana disebabkan oleh kondisi fisik dan ketahanan yang lemah.

4. Informasi tentang bencana : penyebaran pengetahuan tentang kesadaran bencana merupakan salah satu faktor yang paling penting dari kesiapsiagaan bencana. Hal ini bagaimana mengenali tanda-tanda bencana dan cara terbaik untuk bertindak, merupakan hal yang sangat penting dalam merencanakan isi pelatihan bencana, dan penekanan sesuai dengan profil risiko kelompok sasaran (*early warning*) : Pelembagaan sistem peringatan dini yang mencapai penduduk dalam waktu yang memadai merupakan faktor lain yang berkontribusi besar untuk ketahanan terhadap bencana. Dalam merancang sistem ini, adalah sangat penting untuk memastikan bahwa informasi penting mencapai semua segmen masyarakat.

5. Mengembangkan Analisis Gender Moser, kebutuhan praktis perempuan dalam mitigasi bencana setidaknya menyangkut akses logistik, pakatan, shelter dan MCK yang ramah perempuan dan keluarga. Hal ini dapat terpenuhi dengan akses penyediaan data sensitif gender, legal infrastruktur, indikator fisik, asuransi risiko bencana, peringatan bencana, dan kebutuhan strategis berkaitan dengan peningkatan posisi perempuan.

perempuan yang dapat terwujud jika ada rekrutimen pada sebagai aparat atau satuan tugas pengamanan bencana, dan untuk mengurangi hambatan kultural.

Karanganyar : Kabupaten Rawan Bencana

Kabupaten Karanganyar yang secara geografis terletak pada 40° - 110° 70' BT dan 7° 28' - 7° 46' LS, berada di bagian selatan Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan Kabupaten Sragen, sebelah selatan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sebelah Barat dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sebelah Timur dengan Kabupaten Luas wilayah 773,78 Km², terbagi dalam 17 Kecamatan dan 170 Desa.

Wilayah Kabupaten Karanganyar berada dikaki Gunung Lawu, sebagian merupakan daerah dataran rendah, sebagian curam bertebing-tebing. Kondisi geografis yang berbenteng ini membuat wilayah Karanganyar merupakan daerah rawan bencana. Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar pernah mengalami bencana. Data dari BPPD Kabupaten Karanganyar (2013) menunjukkan, luasan wilayah rawan bencana meliputi tanah longsor (104 Desa, 16 Kecamatan), banjir (11 Kecamatan), angin ribut/puting beliung (103 Desa, 17 Kecamatan) dan kekeringan (55 Desa, 8 Kecamatan).

Kerawanan tertinggi adalah akibat tanah longsor yang ditunjukkan dari data peristiwa bencana selama tahun 2000-2014. Bahwa dari 176 bencana alam, terjadi 37 bencana tanah longsor, 14 bencana angin rebut, 29 kebakaran dan 3 bencana banjir yang mengakibatkan 11 rumah roboh, 32 meninggal dan 50 kerusakan infrastruktur. Kabupaten Karanganyar telah memiliki Peraturan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) sebagai badan hukum untuk menanggulangi bencana.

Gender dalam Mitigasi Bencana di Kabupaten Karanganyar : Permasalahan dan Identifikasi Kebutuhan Gender

Meskipun sudah ada payung hukum yang kuat untuk memberikan prioritas penanggulangan bencana yang responsif

gender di lapangan implementasi belum banyak dilakukan. Permasalahan gender dalam manajemen penanggulangan bencana Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana 2014 belum banyak mengakomodir program atau kegiatan sensitif kebutuhan gender. Misalnya kerentanan bencana hanya diidentifikasi dari sisi geografis yaitu letak bencana dari pusat ancaman; sisi demografis atau tingkat kerentanan dari pusat ancaman; sisi kemiskinan. Tidak ada analisis mendalam dan tingkat kemiskinan. Tidak ada analisis kerentanan dari aspek gender. Kemudian kapasitas dalam manajemen bencana hanya diidentifikasi dari kompetensi dan tingkat pusat dan daerah; kearifan lokal dalam tanggap bencana sebagai tingkat bencana; kearifan lokal dalam tanggap bencana sebagai tingkat bencana; kearifan lokal dalam tanggap bencana sebagai tingkat bencana; kearifan lokal dalam tanggap bencana sebagai tingkat bencana. Belum ada analisis kapasitas penanggulangan bencana sebagai tingkat bencana; kearifan lokal dalam tanggap bencana sebagai tingkat bencana. Pembahasan berikut ini mencoba mengkajinya sebagai Kabupaten Karanganyar.

1.1.1. Data Pilah

Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari bencana di Kabupaten Karanganyar. Permasalahan utama adalah data pilah, termasuk mortalitas dan morbiditas. Permasalahan Karanganyar sudah memulai pembuatan tabulasi data berkaitan dengan bencana, namun belum mencakup seluruh wilayah maupun keseluruhan penduduk yang rentan terhadap bencana. Ketiadaan data pilah yang lengkap, menyulitkan mengantisipasi korban dan recovery setelah peristiwa bencana. Akibatnya, korban di setiap lokasi bencana tidak akan dapat diketahui dan ditolong dari dampak bencana yang terjadi. Apalagi dalam bencana tanah longsor yang mengakibatkan korban jiwa dan tertimbun tanah, tidak mudah diketahui apakah korban yang rentan bencana ikut menjadi korban.

Perolehan data yang lengkap, juga akan menyulitkan penentuan lokasi logistik sesuai kebutuhan korban. Perencanaan yang hanya menyesuaikan jumlah penduduk tanpa memperhatikan sensitif gender, akan mengakibatkan salah satu

kelompok gender tidak mendapat bantuan sesuai kebutuhan sering terjadi adalah kurangnya penyediaan kebutuhan makan-anak, susu, selimut, pembalut dan pakaian dalam perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak sakit dan rewel sehingga menambah beban perempuan. Sementara pada perempuan sendiri, kurangnya ketersediaan pembalut dan pakaian dalam akan mengganggu kesehatan dan kenyamanan. Kualitas dan kesiapan perempuan mempengaruhi daya tahan terhadap bencana. Kurangnya logistik juga menambah beban perempuan yang harus bertanggung jawab menyediakan makan keluarga.

Sosialisasi

Kabupaten Karanganyar melalui BPBD memiliki program rutin sosialisasi bencana untuk mendiseminasikan pengetahuan tentang bencana, pencegahan dan penanganannya dengan mengimbangkan partisipasi perempuan dan memasukkan profil gender dalam pelatihan dengan mempertimbangkan profil gender.

Ketidadaan data pilah yang lengkap dapat mengakibatkan kegiatan sosialisasi bencana tidak tepat sasaran. Sosialisasi bencana idealnya dapat menjangkau seluruh warga. Dengan sosialisasi yang menyadari adanya ancaman bencana, sadar bahwa mereka tinggal di wilayah yang rawan bencana, serta mengetahui dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Tanpa data pilah yang lengkap, menyulitkan penyusunan rancangan kegiatan sosialisasi yang sensitif gender menyangkut waktu sosialisasi, tempat yang dilibatkan dalam sosialisasi, tempat sosialisasi, media dan materi sosialisasi. Biasanya ada pandangan umum bahwa kegiatan sosialisasi menjangkau masyarakat bila dilakukan di waktu luang yaitu malam hari. Namun, perempuan dan anak-anak justru malam hari berada di dalam rumah. Sehingga dengan pemilihan waktu malam hari perempuan dan anak-anak tidak terjangkau kegiatan sosialisasi. Apabila ketidakhadiran perempuan dan anak-anak dianggap dapat diwakilkan laki-laki, maka cara ini pun tidak dapat dianggap mewakili rumah tersebut tidak ada anggota keluarga laki-laki. Hal seperti ini tidak jarang terjadi, namun seringkali diabaikan.

Perencanaan dan Penyelamatan Korban Bencana

Perencanaan perempuan dalam mitigasi dan penanganan bencana sangat penting. Mereka dapat berperan dalam sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan juga tentang bencana. Ketika terjadi bencana, perempuan juga lebih sensitif pada kebutuhan perempuan lain yang menjadi korban. Secara formal, jumlah petugas perempuan di Kabupaten Karanganyar jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evakuasi, mereka biasanya bertugas di bidang administrasi petugas perempuan dalam mitigasi dan penanganan bencana, mengakibatkan penanganan yang kurang sensitif gender, antara lain ditunjukkan oleh masih kurangnya perhatian bencana perempuan dan anak-anak dibandingkan laki-laki.

Hambatan Kultural

Hambatan lain yang dapat diidentifikasi adalah perbedaan hambatan kultural. Kasus di Desa Thengkluk yang mayoritas penduduknya berlatar agama Islam menunjukkan warga yang menjadi korban dalam bencana tanah longsor 2012 cukup banyak, diduga berkaitan dengan perbedaan keragamaannya. Bisa jadi, di sini berkembang keyakinan yang bertentangan dengan warga seagama. Sehingga ketika terjadi bencana, mereka merasa perlu melihat latar belakang dan sosialnya, mereka merasa ketika terjadi bencana, mereka lebih memperhatikan. Begitupun ketika terjadi bencana, mereka lebih cenderung untuk menolong atau ditolong sesama warga yang berlatar keragaman sama. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa warga Desa Thengkluk enggan pindah ke tempat lain jika terjadi bencana dengan warga yang berbeda keyakinan. Mereka cenderung hanya bertahan karena mereka tahu bahwa rumahnya berada di lokasi yang aman.

Hambatan kultural lain menyangkut norma untuk melindungi kepentingan laki-laki, termasuk dalam hal makan. Perempuan cenderung jajah lebih dahulu dan lebih banyak memasak untuk anak-anak, dan terakhir perempuan. Padahal, aktivitas memasak yang dilakukan perempuan di rumah dengan menggunakan hampir semua jenis peralatan domestik.

memasak, mencuci, mengasuh anak. Ini artinya, perempuan banyak membutuhkan tenaga. Inilah sebabnya mengapa korban perempuan yang sakit atau meninggal lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

Ketika keluarga akan mengambil keputusan untuk atau pindah ke tempat aman, di sini perempuan terganggu keputusan laki-laki. Jika diputuskan tidak pindah, perempuan yang tetap akan lebih rentan, karena merekalah yang tinggal lama di rumah. Ketika terjadi bencana, perempuan dan anak lebih kecil peluangnya untuk selamat. Seperti kasus bencana Desa Thenglik dan Gerdu, jumlah korban perempuan dan anak lebih besar dibandingkan laki-laki. Di sini sudah ada pendekatan untuk relokasi, namun warga masih belum mau meninggalkan tempat tinggalnya. Hambatan kultural bisa menjadi perempuan dan anak-anak rentan bencana.

Legal Infrastruktur

Permasalahan berkaitan dengan legal infrastruktur mengidentifikasi produk perundang-undangan yang gender. Misal menyangkut kepemilikan aset dan hak waris. Hukum menyangkut kepemilikan aset dan hak waris belum umum di Indonesia, di mana setiap warga negara berhak atas aset dan memiliki hak waris. Namun biasanya kepemilikan rumah di atas namanya laki-laki. Dalam peristiwa bencana, maka mewasaskan laki-laki memiliki rumah, maka rekonstruksi dan bencana membutuhkan waktu lama. Perempuan harus mengisi berbagai surat untuk mendapatkan bantuan dan relokasi rumahnya. Begitu juga jika akan dilakukan relokasi, perempuan yang tidak memegang surat formal tentang kepemilikan rumah dan tanah akan dinomorduakan dalam mendapatkan kompensasi dan aset baru.

Tidak dicantumkan perempuan sebagai pemilik rumah tangga, juga akan menyulitkan bagi perempuan untuk mengakses kredit yang mungkin diperlukan untuk rekonstruksi rumah, mengambil modal pinjaman untuk kembali berdagang, membuka usaha baru. Namun dalam hal hak waris, dengan

anak perempuan memiliki hak waris dan tercantum secara jelas dalam surat kepemilikan warisnya. Di sini perempuan perlu didampingi dalam pengurusan surat warisnya. Anak-anak waris ini sangat bermartabat bagi perempuan dan anak-anak dalam pemulihan akibat bencana.

Asuransi

Asuransi bencana belum menjadi hal yang umum bagi masyarakat Indonesia, apalagi di Kabupaten Karanganyar yang masih wilayahnya masih termasuk pedesaan. Asuransi kesehatan lebih umum bagi PNS, pegawai BUMN dan pegawai umum yang masuk dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), termasuk mereka yang tinggal di Karanganyar. Namun dalam asuransi kesehatan tidak terdapat asuransi akibat bencana alam. Sedang asuransi bangunan yang dimiliki oleh warga yang memiliki bangunan mewah dan mahal.

Infrastruktur Fisik

Infrastruktur infrastruktur fisik, akan berpengaruh pada kemampuan fisik dan mental bagi korban bencana, apalagi bila bencana tinggal di tempat pengungsian dalam waktu yang lama. Infrastruktur fisik menyangkut pembangunan shelter sudah ada di wilayah rawan bencana. Namun shelter yang nyaman, aman dan tahan pada perempuan dan keluarga belum tersedia. Akibat untuk massal, tidak memiliki sekak-sekat. Biasanya, shelter untuk laki-laki dan perempuan akan mengelompokkan perempuan, biasanya akan mengikutu ibunya. Hal ini akan mempengaruhi perempuan, karena akan kesulitan berbagai tugas rumah tangga. Perempuan akan lebih lelah karena menanggung beban berat.

Perempuan laki-laki dan perempuan berburu di dalam shelter, perempuan tidak memiliki ruang khusus untuk beristirahat dan beristirahat. Bagi perempuan yang masih menyusui, hal ini akan mempengaruhi kesehatan diri dan anaknya.

bisa terganggu. Mereka juga tidak akan leluasa berhubungan suami-istri, sehingga masa pengungsian yang panjang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga.

Ruang untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) yang sensitif gender juga belum tersedia. Ruang MCK dibangun seadanya tanpa atap dan kunci yang aman, kurang terawat, jumlahnya terbatas serta tidak ada pembagian secara khusus antara ruang MCK untuk laki-laki dan perempuan. Warga di tempat pengungsian tentu saja perempuan akan merasa khawatir dilihat orang lain dan harus terburu-buru karena sudah ditunggu pengguna lain. Sementara antrian yang panjang juga bisa membuat warga sakit karena harus menahan diri ketika ingin BAB atau BAK. Ruang MCK yang tersedia tidak aman dan nyaman bagi pengungsi.

Infrastruktur fisik untuk peringatan dini akan : ada untuk untuk mendeteksi bencana diletakkan di titik tanah longsor, dipasang di tiang-tiang khusus, kalau ada tanda bencana longsor akan menyala dan berbunyi. Alat ini fungsinya belum maksimal tapi akan terus dicek secara periodik dan ditingkat fungsinya. Perlu sistem peringatan dini yang menjangkau wilayah kegiatan perempuan yang kebanyakan berada di sekitar rumah.

Jalur penyelamatan juga diperlukan. Jalur penyelamatan yang dibangun dengan baik akan mudah diakses oleh perempuan, anak-anak dan difabel yang memungkinkan penyelamatan diri dengan aman dan cepat. Di Kabupaten Karanganyar sudah disediakan jalur evakuasi, namun belum dibangun tersebar di semua wilayah rawan bencana yang dapat diakses oleh seluruh warga. Di samping itu jalur evakuasi dibangun seadanya, hanya dilandasi bambu yang licin dan mudah lepas bila terkena air hujan. Padahal jalur rawan bencana di Kabupaten Karanganyar pada umumnya berada di lereng tebing yang membutuhkan landasan yang kuat.

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa untuk mengurangi bencana di Kabupaten Karanganyar belum sensitif gender sehingga kebutuhan praktis dan strategis perempuan belum dapat terpenuhi seluruhnya. Masalah utama adalah tidak dimilikinya data-pilah yang memadai, adanya hambatan kultural dan kurangnya

perempuan sebagai tenaga pengamanan dan penyelamatan kurban

kegiatan

Bencana alam tidak mendiskriminasi korbananya. Meskipun perempuan merupakan pihak yang paling menderita dalam bencana alam maupun bencana sosial karena perlakuan berbeda, baik secara sengaja atau karena ketidaktahuan.

Perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun oleh masyarakat.

Integrasi bencana di Kabupaten Karanganyar belum sensitif gender, sehingga kebutuhan praktis dan strategis perempuan dapat terpenuhi seluruhnya. Kebutuhan praktis perempuan meliputi integrasi bencana setidaknya menyangkut penyediaan alat pakalan, shelter dan MCK yang ramah perempuan dan sebagainya. Hal ini dapat terpenuhi dengan adanya penyediaan data yang sensitif gender, legal infrastruktur, infrastruktur fisik, asuransi bencana, peringatan bencana. Sedang kebutuhan strategis perempuan dengan peningkatan posisi perempuan, yang dapat dilakukan jika ada penambahan perempuan sebagai aparat atau tenaga pengamanan bencana.

Kesimpulan dan merekomendasikan tiga hal. *Pertama*, perlu segera dilakukan data-pilah yang memadai termasuk data mortalitas dan morbiditas. *Kedua*, merancang dan mengimplementasikan program-program yang sensitif gender untuk semua wilayah rawan bencana. *Dan ketiga*, merekrut lebih banyak perempuan sebagai tenaga pengamanan dan penyelamatan kurban bencana.

Daftar Pustaka

Agarwal, Annu. 2011. *Mainstreaming Gender into Disaster Recovery and Reconstruction*. The World Bank Institute. E-book resources. [worldbank.org/CM/UDLP/Resources/](http://www.worldbank.org/CM/UDLP/Resources/) background Doc

- Enarson, Elaine. 2001. *Gender Equality, Environmental Management and Natural Disaster Mitigation*. United Nations Division for the Advancement of Women (DAW) International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) Expert Group Meeting.
- "Environmental management and the mitigation of natural disasters: a gender perspective" 6-9 November 2001. Ankara, Turkey.
- Handayani, Trisakti dan Sugianti. 2002. *Konsep dan Teknik Penanggulangan Bencana*. Gender. Malang: UMM Press.
- Irwanto. 2006. Focused Group Discussion. Jakarta: Buku Obor.
- Krueger, Richard A. 1994. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. Sage Publications, Inc. California.
- Lawry, Lynn. 2008. *Public Health Management After Natural Disasters*. <<http://www.wilsoncenter.org/event/public-health-management-after-natural-disasters>>
- Lisna, Evi dkk. 2011. *Strategi Penguatan Peran Gender dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Aceh (Study Kasus Kecamatan Meureudu Kabupaten Aceh Jaya)*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Kebencanaan TDMRC-UNWISA Banda Aceh, 13-19 April 2011
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Plummer, Thomas dan Eric Neunmayer. 2007. *The Gender of Natural Disaster ; The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy*. 1981-2002. Annals Association of American Geography. 97 (3). Pp. 551-556
- Priyono, Juniawan. 2007. *Manajemen Bencana yang Berbasis Gender*. <<http://juniawan.wordpress.com/2007/01/18/manajemen-bencana-yang-berbasis-gender/>>
- Ridho, Muhammad Subhi. 2011. *Pentingnya Pengarusutamaan gender dalam dalam bencana*. <<http://genderworkinggroup.org/?p=23>>
- Si Maken. 2005. *Penanganan Pascabencana Alam Berperspektif Gender*. Artikel dalam Kompas. 7 Februari 2005. Hal 44.
- Soelichandono, Moejiarto. 1996. *Pembangunan : Dilema dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wilson Center. 2008. *Public Health Management After Natural Disasters*. <<http://www.wilsoncenter.org/event/public-health-management-after-natural-disasters>>.
- Wilson Center. Carla R. *Natural Disasters: Prepare, Mitigate, Manage*. <<http://www.csa.com/discoveryguides/archives/ndht.php>>